

Dana BOS Tak Cukup Beli Buku



Sumber gambar: *TribunKaltim.co* Kamis, 08/08/2024

➤ **Komisi IV Samarinda Dorong Pemerintah dan Swasta Bersinergi**

SAMARINDA, TRIBUN – Persoalan pembelian buku penunjang sekolah di Samarinda nyatanya masih terus menjadi sorotan. Meski permasalahan ini seakan menjadi siklus tahunan, kali ini kehebohannya semakin terasa. Pasalnya, tak sedikit orang tua siswa merasa khawatir anak-anak mereka tidak akan mampu mencapai nilai minimal yang ditetapkan, jika tertinggal kebutuhan literasinya lantaran tak memiliki buku penunjang sekolah dalam kegiatan belajar mengajar.

Alhasil, beberapa waktu lalu para perwakilan orang tua siswa menggelar aksi dan mendesak agar dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasikan untuk membeli kebutuhan buku penunjang.

Hal ini pun nyatanya telah sampai pada Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti. “Tahun ke tahun seperti itu permasalahannya,” sebutnya saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda, Rabu (7/8).

Puji menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran sekolah agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak sekolah dan orang tua siswa. Di samping itu, dirinya juga mengingatkan bahwa berdasarkan aturan yang berlaku, penggunaan dana BOS memang tak sepenuhnya dapat dialokasikan untuk membeli buku. “Karena itu ada dan sesuai juknis (petunjuk teknis), pengadaan buku dana BOS itu maksimal 15 persen,” sebut Puji.

Lanjutnya, meskipun pemerintah kota mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pendidikan, namun penggunaannya terbagi untuk berbagai keperluan, seperti pembangunan sekolah dan pengadaan buku perpustakaan. “Peran pemerintah daerah hanya 20 persen dari *mandatory* APBD,” ungkapnya.

Puji mencontohkan, misalnya pada suatu daerah memiliki anggaran APBD dengan nilai Rp5,7 triliun, maka Rp1,4 triliun dialokasikan untuk pendidikan. Anggaran Rp960 miliar dialokasikan untuk membayar tunjangan guru, belum lagi sertifikasi, hingga Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD dan pendidikan kesetaraan. “Jadi itu masih sangat kurang,” sebutnya.

Sementara itu, menurut Puji permasalahan ini semakin kompleks lantaran adanya beberapa kali perubahan kurikulum, yang pada akhirnya membebani daerah untuk menyesuaikan diri. Puji menyebut dana BOS saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan semua siswa, terutama bagi keluarga kurang mampu yang harus membeli buku baru setiap kali ada perubahan kurikulum.

Politikus Partai Demokrat ini juga menyoroti adanya keterlambatan pengiriman buku paket ke sekolah, sehingga hal ini juga dinilai menghambat proses pembelajaran. Termasuk juga, dirinya mempertanyakan efektivitas Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam membantu memenuhi kebutuhan pendidikan anak dari keluarga kurang mampu.

“Yang harus digali, tiga pilar pendidikan itu kan ada masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. CSR juga bisa atau dengan orangtua asuh. Makanya itu juga yang kami suarakan terutama dari Fraksi Demokrat, masalah pendidikan selalu kami sampaikan,” pungkasnya.

Sementara itu, sebagai tindak lanjut dari laporan orangtua siswa, Wali Kota Samarinda Andi Harun telah menugaskan tim khusus untuk melakukan penyelidikan, yang kemudian mengerahkan Asisten I Sekretaris Kota Samarinda Ridwan Tassa untuk menindaklanjuti persoalan ini.

“Perwakilan memang ada mengumpulkan bukti dari 30 sekolah. Dari bukti-bukti yang ada, akan kami tinjau dan datangi dan mempertanyakan kebenarannya. Harapannya secepatnya dapat selesai penelusurannya,” ungkap Tassa.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda Asli Nuryadin menjelaskan bahwa sebelum tim khusus dibentuk, pihaknya telah melakukan penelusuran lebih dulu.

Terlebih, selain masalah pembelian buku penunjang, aksi yang digelar di depan Balai Kota pada beberapa waktu lalu ternyata juga menyoroti masalah lain. Beberapa orangtua siswa mengaku bahwa anaknya menerima intimidasi. “Kami sudah gerak sejak hari demo itu (31/7). Sudah kami *follow up*, kami telusuri beberapa sekolah,” tegas Asli.

Meski demikian, Asli menegaskan bahwa untuk menuntaskan identifikasi dan mengungkap kebenarannya, tak semudah membalikkan telapak tangan. Mengingat jumlah sekolah SD dan SMP tidak sedikit.

Sebab itu, Asli mengimbau masyarakat untuk bersabar dan tidak terburu-buru membuat kesimpulan sebelum adanya hasil penyelidikan yang komprehensif. “Tapi agar

dimaklumi, jumlah sekolah kita ada ratusan. Tapi kami pasti merespon dan mengecek, mohon ditunggu karena itu butuh proses yang tidak bisa cepat pastinya. Kalau memang ada yang terbukti demikian, kami serahkan ke inspektorat untuk tindakan selanjutnya,” pungkasnya. (snw)

Sumber berita:

1. TribunKaltim, Dana BOS Tak Cukup Beli Buku, 08/08/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Permendikbudriset 63/2022) bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
2. Dalam Pasal 7 Permendikbudriset 63/2022 diatur sebagai berikut:
 - (1) Satuan Pendidikan penerima dana BOS meliputi:
 - a. SD;
 - b. SDLB;
 - c. SMP;
 - d. SMPLB;
 - e. SMA;
 - f. SMALB;
 - g. SLB; dan
 - h. SMK.
 - (2) Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dana BOS reguler; dan
 - b. dana BOS kinerja.